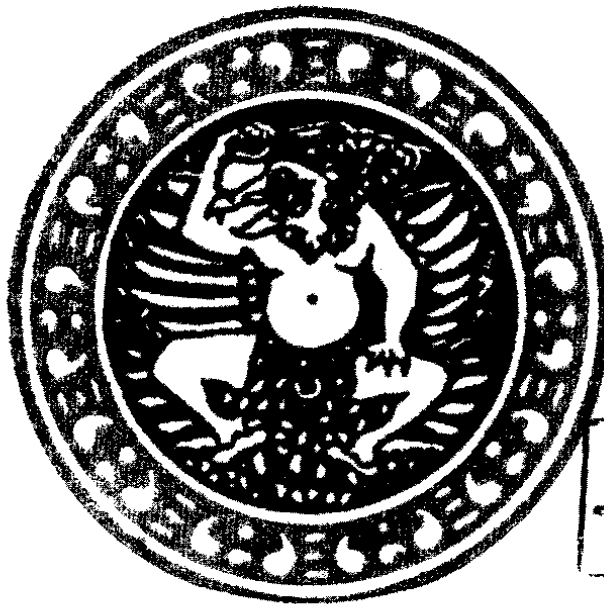


KEBIJAKSANAAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

(Studi Kasus Pembentukan Kecamatan Kunjang
di Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri)

SKRIPSI



kk
Fis p 138/97
Pra
k

MIIE
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

Oleh :

WIDYA PRAMANA

NPM : 078811707

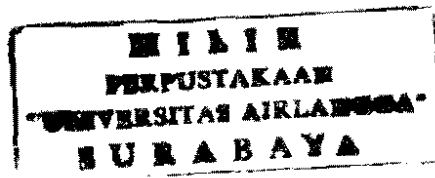
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GASAL 1993 / 1994

KEBIJAKSANAAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

**(Studi Kasus Pembentukan Kecamatan Kunjang
di Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri)**

SKRIPSI

**Sebagai Syarat Untuk Menempuh Gelar Sarjana
di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Negara
Universitas Airlangga**



Oleh :

WIDYA PRAMANA

NPM : 078811707

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
SEMESTER GASAL 1993 / 1994**

Lembar Persetujuan

Surabaya, 24 Desember 1993

Menyetujui Untuk Diujikan

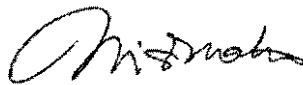
Dosen Pembimbing,



(Drs. Wisnu Pramutanto P.)

NIP. 131 453 124

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu. Politik
FISIP UNAIR,



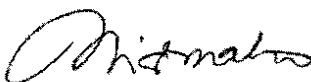
(Drs. Priyatmoko, MA)

NIP. 130 937 052

Lembar Pengesahan

*Skripsi Ini Telah Dipertahankan
Dihadapan Komisi Penguji
Pada Hari Sabtu, 15 Januari 1994*

Ketua Komisi Penguji,



(Drs. Priyatmoko, MA)

NIP. 130 937 052

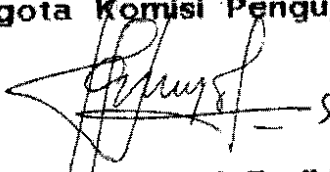
Anggota Komisi Penguji,



(Drs. Wisnu Pramutanto P.)

NIP. 131 453 124

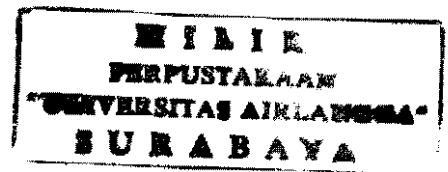
Anggota Komisi Penguji,



(Dra. Dwi Windyastuti Budi H., MA)

NIP. 131 801 643

BAB V
P E N U T U P



5.1 Kesimpulan

Sebagai suatu upaya pemerintah dalam menciptakan kondisi pemerintahan yang efektif dan efisien, kebijaksanaan pembentukan Kecamatan dilatar belakangi oleh meningkatnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah daerah tempat Kecamatan akan didirikan. Sebab kebutuhan akan terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan yang efektif dan efisien akan lebih mengedepan di daerah-daerah tersebut dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

Pada kenyataannya kebijaksanaan tidak saja diterapkan pada daerah-daerah yang memenuhi kedua persyaratan tersebut, akan tetapi juga diterapkan pada daerah-daerah dimana dari segi jumlah penduduk belum terlalu banyak dan dari segi wilayah tidak begitu luas. Dalam hal ini, tidak lepas dari kepentingan Pemerintah Kabupaten Tingkat II untuk memperbesar pendapatan namun dengan cara sedikit mungkin mengeluarkan biaya, sehingga tidaklah mengherankan bila pembentukan Kecamatan mengambil tempat, justru, dimana berbagai fasilitas umum telah tersedia di tempat tersebut. Sebab dengan kebijaksanaan

ini eksploitasi Pemda terhadap sumber-sumber keuangan akan semakin besar dibandingkan saat sebelumnya, dimana sumber-sumber tersebut selalu mudah diawasi Pemda karena jaraknya yang semakin dekat dengan aparat Pemda (Kecamatan), akan tetapi tanpa perlu keluar biaya cukup besar guna menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung tugas-tugas pemerintahan.

Maka jelas sekali tampak bahwa ternyata efektifitas dan efisiensi pelayanan dan peningkatan penyelenggaraan pembangunan hanyalah tujuan yang bersifat formil belaka. Pada kenyataannya, tujuan yang justru dikedepankan dalam kebijaksanaan pembentukan Kecamatan adalah tujuan-tujuan yang bersifat politis, dalam bentuk eksploitasi sumber-sumber keuangan di daerah dimana suatu Kecamatan akan didirikan.

Beberapa tingkatan pemerintahan terlibat dalam proses perumusan kebijaksanaan ini, yaitu pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II. Meskipun usulan mengenai pembentukan suatu Kecamatan berasal dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II, namun pada kenyataannya tingkatan pemerintahan ini justru paling lemah posisi tawar-menawarnya dibandingkan dengan dua tingkatan pemerintahan lainnya. Hal ini mengakibatkan terlalu kakunya pihak Kabupaten mendasarkan diri pada ketentuan-ketentuan otoritatif yang dibuat oleh Pusat

maupun Propinsi Daerah Tingkat I, bahkan terkesan mengesampingkan karakteristik daerah dimana suatu Kecamatan akan didirikan. Bagi pihak Kabupaten Daerah Tingkat II suatu daerah dipandang tidak pantas untuk diusulkan menjadi suatu Kecamatan jika tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berasal dari pemerintah atasan, meskipun dari segi jumlah penduduk maupun luas wilayah daerah tersebut layak berbentuk Kecamatan.

Hal ini berlaku pula pada proses perumusan kebijaksanaan pembentukan Kecamatan, melalui beberapa tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat, khususnya Menteri Dalam Negeri. Pihak Pemerintah Kabupaten Tingkat II tidak bisa tidak harus mengikuti tahapan-tahapan tersebut, meskipun memakan waktu lama dan biaya besar. Namun, proses perumusan kebijaksanaan pembentukan Kecamatan tidak melibatkan pihak Kecamatan induk, dan lagi tidak setiap instansi pemerintahan dilibatkan dalam proses perumusan kebijaksanaan.

Akibatnya dalam pelaksanaan kebijaksanaan, Kecamatan yang baru tidak dapat segera melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal. Kurangnya informasi diantara instansi-instansi pemerintahan mengenai adanya suatu Kecamatan yang baru mengakibatkan instansi-instansi itu tidak segera mengantisipasi kebijaksanaan ini dalam bentuk membuka perwakilan di Kecamatan yang

baru dibentuk. Keadaan ini menghambat koordinasi antara pihak Kecamatan dengan instansi-instansi tersebut, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas yang mengharuskan keterlibatan pihak Kecamatan dengan instansi-instansi tersebut. Hal ini juga menghambat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, karena jarak dan waktu yang ditempuh untuk berurusan dengan pihak pemerintah sama halnya, bahkan lebih banyak, dibandingkan pada saat belum dibentuknya Kecamatan baru.

Pelaksanaan kebijaksanaan pembentukan Kecamatan juga tidak diimbangi dengan kesiapan dan kemampuan aparat Kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini ditandai dengan terbatasnya jumlah aparat di Kantor Kecamatan yang baru dibentuk. Berhadapan dengan keterbatasan ini Camat menggunakan segala cara untuk melaksanakan tugas-tugasnya, diantaranya melalui cara-cara represif kepada Desa-Desa, sehingga target-target yang dibebankan kepada pihak Kecamatan dapat terpenuhi.

5.2. Saran Saran

Saran pertama yang perlu dikemukakan disini adalah mengurangi keterlibatan Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dalam perumusan kebijaksanaan yang berkenaan dengan Kecamatan, termasuk diantaranya adalah perumusan kebijaksanaan pembentukan suatu Kecamatan. Sebaliknya, peranan lebih besar diberikan kepada

Pemerintah Kabupaten Tingkat II sehingga menghemat waktu dan biaya selama proses perumusan kebijaksanaan. Hal ini mengingat kedudukan Kabupaten yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan dua tingkatan pemerintah tersebut. Dalam hal ini pihak Pusat maupun Pemerintah Propinsi sebatas memberikan rekomendasi / persetujuan, tidak perlu melakukan survai kelayakan berkali-kali, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan sendiri oleh pihak Kabupaten.

Disamping itu, sebelum kebijaksanaan dilaksanakan, khususnya kebijaksanaan pembentukan Kecamatan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijaksanaan tersebut perlu dilengkapi terlebih baik personil maupun sarana dan prasarana. Hal ini diperlukan guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kecamatan yang baru dibentuk, dan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.